

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang Masalah**

Dengan adanya perkembangan teknologi informasi komunikasi yang semakin pesat di era digital saat ini, menjadikan teknologi sangat dibutuhkan dalam kehidupan masyarakat. Pada saat ini tidak ada hal satupun yang tidak menggunakan teknologi, dimulai dari alat untuk berkomunikasi hingga sebagai alat transaksi. Di dalam instansi pemerintah, teknologi sangat dibutuhkan untuk menunjang proses pelayanan publik, agar pelayanan yang diberikan oleh instansi pemerintah menjadi semakin berkualitas. Pelayanan dapat dikatakan berkualitas apabila kebutuhan masyarakatnya sudah terpenuhi dan pemerintah dapat menyediakan produk dan jasa sesuai dengan kebutuhan masyarakat dengan mudah, cepat, transparan dan juga akuntabel.

Upaya tersebut berkaitan dengan pengelolaan keuangan daerah yang dapat menyajikan laporan pertanggungjawaban keuangan pemerintah yang memenuhi prinsip tepat waktu, akurat dan dapat disusun dengan mengikuti Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kualitas sistem informasi dalam laporan keuangan pemerintah tersebut sangat dipengaruhi oleh kepatuhan terhadap standar akuntansi dan didukung oleh sebuah sistem yang handal.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah berbasis Akrual merupakan basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas yang diterima atau dibayar. Menteri Dalam Negeri menerbitkan peraturan yang mengatur penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis akrual pada pemerintah daerah. Peraturan tersebut yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2013 Tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah. Peraturan tersebut bertujuan untuk membantu instansi-

instansi pemerintah daerah untuk menyusun laporan keuangannya sesuai dengan standar akuntansi pemerintah yang berlaku. Standar Akuntansi Pemerintah berbasis akrual merupakan Standar Akuntansi Pemerintah yang mengakui pendapatan, beban, aset, utang, dan ekuitas dalam pelaporan finansial berbasis akrual serta mengakui pendapatan, belanja dan pembiayaan dalam pelaporan pelaksanaan anggaran berdasarkan basis yang ditetapkan oleh APBD.

Sebagai salah satu instansi pemerintah, maka Kecamatan Kelapa Gading menjalankan fungsinya dalam hal pengelolaan keuangan yang dananya berasal dari negara, maka dari itu kecamatan kelapa gading harus mengikuti perkembangan peraturan pemerintah. Perkembangan yang semakin pesat dalam pengelolaan keuangan sebagai bentuk peningkatan kualitas laporan keuangan demi terwujudnya akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan. Berbagai upaya telah dilakukan untuk meningkatkan kualitas pelaporan keuangan diantaranya dengan dikembangkannya kebijakan akuntansi pemerintah berupa Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) yang bertujuan untuk memberikan pedoman pokok dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

Menurut Soeradi (2019 : 11) menyatakan bahwa penerapan akuntansi berbasis akrual yang dimaksud yaitu untuk memperbaiki kualitas penyajian laporan keuangan pemerintah dan menjanjikan data yang akurat dalam mengukur kinerja pemerintah. Dalam akuntansi berbasis akrual dapat menunjukkan bagaimana pemerintah membiayai aktivitas dan memenuhi kebutuhannya lebih memungkinkan pengguna laporan untuk mengevaluasi kemampuan pemerintah saat ini untuk membiayai aktivitas dan memenuhi kewajibannya serta lebih riil untuk menunjukkan posisi keuangan pemerintah dan perubahan posisi keuangannya.

Dalam mendukung penerapan akuntansi berbasis akrual pemerintah berinisiatif untuk memanfaatkan dan mengembangkan kemajuan teknologi untuk meningkatkan kemampuan pengelolaan keuangan daerah. Adanya teknologi di dalam instansi pemerintah dapat memberikan kemudahan, bukan hanya bagi masyarakat saja yang mendapatkan informasi tetapi bagi instansi pemerintahan

juga untuk menyediakan pelayanan yang berkualitas. Pemerintah menerapkan *E-Government* yang merupakan sebuah sistem informasi yang dapat dilakukan oleh pemerintah untuk melakukan pelayanan berbasis internet untuk masyarakat dan bertujuan untuk mencapai tata kelola pemerintahan di Indonesia yang baik atau *Good Governance* yang dimana memiliki transparansi dan akuntabilitas didalamnya.

Pemerintah Daerah telah menerapkan *E-Government* dengan membangun teknologi informasi di bidang keuangan dan pengelolaan keuangan daerah untuk memberikan informasi keuangan yang komprehensif dan dapat dilengkapi dengan bukti-bukti penggunaan anggaran yang sah serta sesuai dengan peraturan yang berlaku. Sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor 161 Tahun 2014 atas perubahan Peraturan Gubernur Nomor 142 Tahun 2013 Tentang Sistem Dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 Tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah, bahwa seiring dengan perkembangan teknologi yang semakin modern dan canggih maka akses informasi bagi masyarakat luas akan semakin mudah dan terjangkau. Oleh karena itu, pemerintah memerlukan sistem informasi keuangan yang lebih terbuka dan dapat memudahkan proses konsolidasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Sistem informasi keuangan tersebut yaitu Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD).

Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) yaitu sebuah aplikasi terpadu dari pemerintah yang digunakan sebagai alat bantu pemerintah daerah dalam meningkatkan efektivitas implementasi dari berbagai regulasi bidang pengelolaan keuangan daerah berdasarkan dengan asas efisiensi, efektif, ekonomis, transparan, akuntabel dan auditable. Adanya Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) dalam pengelolaan keuangan daerah ini semakin memudahkan para pegawai dalam menyediakan informasi anggaran yang lebih akurat dan pengembangan komitmen pemerintah daerah dalam menjalankan kewajibannya yaitu untuk menyebarkan informasi keuangan yang transparan sehingga dapat memudahkan pelaporan, pengendalian serta penyebaran informasi. Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) dapat memfasilitasi

kegiatan pengelolaan keuangan daerah yang meliputi dengan penganggaran, perencanaan, penatausahaan dan pertanggungjawaban.

Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) menyajikan sebuah informasi keuangan dan non keuangan dari setiap daerah. Data keuangan yang digunakan oleh SIPKD ini terdiri dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Dana Perimbangan, Neraca Daerah, Laporan Arus Kas, Catatan atas Laporan Keuangan Daerah, Laporan Keuangan Perusahaan Daerah, dan data yang berkaitan dengan kebutuhan fiskal dan kapasitas fiskal daerah. Daerah yang menggunakan aplikasi SIPKD hanya Daerah Berbasis Implementasi (DBI) atau daerah yang berminat untuk mengimplementasikan aplikasi SIPKD ini.

Penyajian laporan keuangan di Kecamatan Kelapa Gading disajikan oleh aplikasi Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) yang dimana laporan keuangan Kecamatan Kelapa Gading dalam bentuk pertanggungjawaban Kecamatan Kelapa Gading atas pelaksanaan APBD. Laporan keuangan Kecamatan Kelapa Gading disusun berdasarkan kebijakan akuntansi dari pemerintah daerah yaitu prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh pemerintah daerah sebagai pedoman dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan untuk memenuhi kebutuhan pengguna laporan keuangan dalam rangka meningkatkan keterbandingan laporan keuangan terhadap anggaran antar periode maupun antar entitas.

Kecamatan kelapa gading merupakan kecamatan yang berada di Jakarta Utara, Kecamatan ini memiliki infrastruktur yang bagus dan memiliki kawasan kuliner yang membuat banyak pengunjung datang ke wilayah ini. Kawasan kelapa gading ini juga termasuk kawasan yang elit, selain itu kecamatan kelapa gading selalu menjadi contoh untuk kecamatan-kecamatan lain dalam hal penyajian laporan keuangan disetiap tahunnya.

Penerapan aplikasi SIPKD bisa saja mengalami hambatan yang mengakibatkan ketidak sesuaian pada penerapan aplikasi SIPKD oleh instansi pemerintah seperti kurangnya SDM , kapasitas memori dalam server yang kurang cukup, salah penginputan data, salah input kode transaksi, adanya gangguan

jaringan yang menyebabkan terjadinya sistem menjadi error dan keterlambatan untuk mengumpulkan data serta masalah teknis lainnya. Seiring dengan berjalannya waktu, penerapan aplikasi SIPKD ini menimbulkan dampak yang positif dan juga negatif. Dampak negatifnya yaitu di wilayah DKI Jakarta pada tahun 2015 mengalami keterlambatan pembayaran gaji guru yang disebabkan karena aplikasi Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) yang masih bermasalah. Sistem tersebut membuat Dinas Pendidikan DKI Jakarta mengalami kesulitan untuk memproses data. Dampak negatif ini bertentangan dengan pernyataan dari situs Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri yang menyatakan bahwa aplikasi SIPKD dibuat dengan harapan menjadi salah satu solusi terhadap kesulitan operasional pengelolaan keuangan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Penyebab dari kesulitan operasional pengelolaan keuangan daerah dikarenakan adanya SDM yang berlatar belakang akuntansi, sehingga aplikasi SIPKD ini dibuat atas dasar permasalahan tersebut.

Penelitian tentang pengaruh Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah terhadap kualitas laporan keuangan sudah pernah dilakukan oleh (Yusup, 2016). Hasil penelitian menunjukkan bahwa Aplikasi Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Daerah sebesar 72,1% sementara sisanya sebesar 27,9% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang kemungkinan dapat mempengaruhi kualitas laporan keuangan daerah.

Pernah dilakukan juga oleh (Sayekti dan Putarta, 2016) tentang Penerapan *Technology Acceptance Model* (TAM) dalam pengujian model penerimaan sistem informasi keuangan daerah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerimaan SIPKD di instansi pemerintah wilayah Yogyakarta dipengaruhi oleh persepsi pemakai terhadap kemudahan penggunaan sistem, Penerimaan SIPKD di instansi pemerintah tidak dipengaruhi oleh persepsi kemanfaatan sistem dan secara simultan persepsi kemudahan penggunaan (PEU) dan persepsi kegunaan (POU) mempengaruhi penerimaan SIPKD. Dalam hal ini penggunaan SIPKD akan lebih mudah menerima aplikasi SIPKD apabila mereka sudah merasa bahwa aplikasi SIPKD ini mudah untuk digunakan dan mempunyai manfaat dalam pekerjaan mereka.

Pernah dilakukan juga oleh (Sari, 2018) bahwa Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD), Sistem Pengendalian Internal dan pemanfaatan Teknologi Informasi berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan kota Pekanbaru dan Standar Akuntansi Pemerintah tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kualitas laporan keuangan kota Pekanbaru.

Dari hasil penelitian tersebut menunjukkan hasil yang berbeda dan menyebabkan dampak yang cukup besar terhadap penyajian pertanggungjawaban akuntansi, maka dari itu peneliti memiliki motivasi untuk melakukan penelitian kembali. Penelitian ini sangat penting dilakukan karena dapat mengembangkan pengetahuan yang sudah ada dan untuk menunjukkan hasil yang konsisten dan tidak konsisten dari penelitian yang akan dilakukan serta untuk membuktikan kebenaran dari hasil penelitian sebelumnya. Dari latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas peneliti tertarik untuk mengangkat kedalam penelitian yang berjudul “ANALISIS PENERAPAN DAN IMPLEMENTASI SIPKD TERHADAP LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH DI KECAMATAN KELAPA GADING”.

### **1.2. Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis dapat mengidentifikasi masalah-masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana penerapan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) di Kecamatan Kelapa Gading ?
2. Bagaimana implementasi Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) di Kecamatan Kelapa Gading?

### **1.3. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang diuraikan, maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui penerapan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) di Kecamatan Kelapa Gading.
2. Untuk mengetahui implementasi Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) di Kecamatan Kelapa Gading.

#### **1.4. Manfaat Penelitian**

Berdasarkan tujuan diatas, maka penelitian ini diharapkan akan memberikan manfaat bagi semua pihak diantaranya :

1. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk menambah wawasan dan pengetahuan baik secara teori maupun praktik peneliti.

2. Bagi Peneliti selanjutnya

Hasil penelitian yang dilakukan peneliti dapat dijadikan bahan perbandingan dari penelitian yang telah ada serta dapat menambahkan sumber informasi untuk penelitian pada waktu yang mendatang dan memiliki topik yang sama sehingga dapat dijadikan sebagai referensi.

3. Bagi Instansi Pemerintah

Hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti diharapkan dapat memberikan informasi yang bisa menjadi pandangan dan pengetahuan serta bahan pertimbangan instansi pemerintah dalam mengambil sebuah keputusan terutama di dalam keputusan untuk menerapkan aplikasi Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) agar implementasinya dapat berjalan dengan efektif dan efisien, serta bisa menghasilkan suatu sistem informasi yang berkualitas dan mempunyai kompetensi yang tinggi.